

Pencegahan KBGO Guna Membangun Ruang Aman Digital Bagi Anak & Perempuan Muslim di Era Society 5.0

Cindenia Puspasari^{✉1}, Eva Darnila², Widyana Verawaty Siregar³, Ade Muana Husniati¹, Ainol Mardhiah¹

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia, cindenia@unimal.ac.id;

ade.muana@unimal.ac.id; ainol.mardhiah@unimal.ac.id

²Program Studi Teknik Informatika, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia, eva.darnila@unimal.ac.id

³Program Studi Manajemen, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia, widyana.verawaty@unimal.ac.id

✉Corresponding Author: cindenia@unimal.ac.id | Phone: +62821 2342 7827

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sebagai upaya membangun ruang aman digital bagi anak dan perempuan di era Society 5.0, di mana teknologi seperti AI, IoT, dan big data dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah sosial sambil menempatkan manusia sebagai pusatnya. KBGO, sebagai bentuk kekerasan gender yang difasilitasi teknologi (menurut UN Women), mencakup pelecehan online, revenge porn, doxxing, cyberstalking, deepfake pornography, dan hate speech berbasis gender. Dampaknya merusak kesehatan mental korban, terutama generasi muda, serta memperburuk ketidaksetaraan gender dan menghambat partisipasi perempuan di ruang digital. Di Indonesia, kasus KBGO melonjak dan didominasi penyebaran konten intim non-konsensual. Upaya anti-KBGO meliputi strategi edukasi kampanye #AwasKBGO oleh SAFENet, Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang diperingati 25 November-10 Desember, serta inisiatif pemerintah melalui KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan regulasi seperti UU ITE. Artikel ini berbasis pengabdian masyarakat di Universitas Malikussaleh menggunakan teknik PAS (*Problem-Agitate-Solution*) untuk edukasi. Strategi pencegahan mencakup edukasi kesadaran masyarakat tentang *consent* dan etika digital, dukungan korban melalui laporan dan konsultasi psikologis, peran platform digital dalam deteksi konten berbahaya, serta kolaborasi multi-pihak untuk transformasi budaya. Gerakan ini tidak hanya melindungi korban, tetapi juga membangun akhlak generasi muda menuju Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan bebas diskriminasi, dengan ajakan aktif melaporkan kasus ke lembaga terkait.

Kata Kunci: Strategi Edukasi, Kampanye Anti-KBGO (#AwasKBGO, 16 HAKTP); Ruang Aman Digital Anak dan Perempuan, PAS Model, Society 5.0

Pendahuluan

Perempuan memiliki potensi luar biasa untuk turut berkontribusi dalam memberdayakan dan melindungi perempuan Muslim dari tantangan online di era Society 5.0. Jepang mengusulkan pertama kali konsep masyarakat Society 5.0 dengan menempatkan manusia sebagai pusatnya, bertujuan untuk menyeimbangkan solusi atas permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi (Clerck, 2017). Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Kementerian Sains dan Teknologi Jepang pada tahun 2016 sebagai rencana dasar sains dan teknologi kelima, lalu dipresentasikan di CeBIT (*Centrum der Büro- und Informationstechnik*) pada tahun 2017. Konsep Society 5.0 ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan manusia dalam mengolah informasi yang semakin deras dan kompleks di era digital. Harapannya, masyarakat bisa menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup (Office, 2021).



Gambar 1. Society 5.0 : Kolaborasi Berbagai Bidang Untuk Pemecahan Masalah Sosial

Penerapan Society 5.0 sudah terlihat dalam berbagai bidang kehidupan. Di bidang kesehatan dengan teknologi yang digunakan untuk mendeteksi penyakit secara *real-time* dan pembagian data riwayat pasien jadi lebih mudah sehingga layanan kesehatan menjadi lebih baik. Di sektor transportasi, ada kursi roda otomatis untuk lansia dan disabilitas, serta sistem integrasi transportasi publik yang memudahkan mobilitas masyarakat perkotaan. Bahkan untuk penanggulangan bencana, teknologi membantu menyediakan data tempat pengungsian terdekat lewat ponsel dan mempercepat penemuan korban. Jepang sendiri sudah menjadi negara yang berhasil menerapkan konsep ini, meskipun untuk negara berkembang seperti Indonesia memang masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Jadi teknologi modern kini seperti kecerdasan buatan dan robot memang dipakai, tapi tujuannya untuk membantu manusia hidup lebih nyaman dan produktif, bukan menggantikan peran manusia. Di sini manusia tetap jadi aktor utama yang menciptakan nilai baru lewat teknologi tersebut (Hardi et al., 2020), (Hasibuan et al., 2021).

Konsep Society 5.0 ini diyakini dapat menciptakan kenyamanan dan memperpanjang generasi setiap orang dalam kehidupan produktif, sekaligus menyeimbangkan solusi atas permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi. Dalam adaptasinya revolusi Industri 4.0 dengan teknologi seperti AI, IoT, dan big data telah dimulai dan banyak diaplikasikan. Maka konsep Society 5.0 mulai dikembangkan sebagai penyempurnaan kolaborasi manusia yang lebih erat demi meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi masalah sosial, seperti kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan terus terjadi di ruang fisik, digital, komunitas, tidak terkecuali institusi. Ruang aman yang semestinya melindungi justru kian tergerus, sementara implementasi kebijakan perlindungan perempuan *to-slow walk*. Sehingga situasi ini lah yang menuntut keberanian kolektif untuk bersuara, bergerak, dan mengubah keadaan yang lebih baik bagi perempuan (Hasibuan, Sayuti, Fithra, et al., 2023).

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, ruang maya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Namun, di balik kemudahan akses informasi dan komunikasi, timbul adanya ancaman serius berupa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). KBGO dikenal dengan sebutan dari Kekerasan Berbasis Gender yang difasilitasi teknologi menurut UN Women, mencakup berbagai bentuk seperti ancaman secara daring, doxing (penyebaran informasi pribadi), trolling, cyberbullying, hate speech, public shaming, intimidation threats dan cyberstalking. Bentuk kekerasan ini tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga mengancam nilai-nilai moral masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, fenomena ini semakin marak, dengan laporan menunjukkan peningkatan kasus signifikan pada tahun 2024, di mana korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan. KBGO bukan sekadar gangguan sesaat, melainkan refleksi dari ketidaksetaraan gender yang lebih dalam, yang sering kali dimanifestasikan melalui media sosial, aplikasi pesan, atau forum online. Oleh karena itu, gerakan anti KBGO menjadi krusial, tidak hanya sebagai upaya pencegahan kekerasan, tetapi juga sebagai sarana membangun akhlak generasi muda yang lebih baik.

Bentuk-Bentuk KBGO

Kekerasan terhadap perempuan di dunia maya adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia, meskipun tidak fisik, tapi dampaknya setara dengan kekerasan nyata. Ini mencakup pelanggaran privasi, integritas tubuh, dan kebebasan berekspresi. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), di mana teknologi digunakan untuk menargetkan portrayal perempuan.

Tabel 1. Bentuk-bentuk KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online)

No.	Bentuk – Bentuk KBGO
1	Pelecehan Online (<i>Verbal Abuse, Trolling, Ancaman</i>).
2	Penyebaran Gambar Intim Tanpa Persetujuan (<i>Revenge Porn</i>).
3	<i>Doxxing</i> (Pembocoran Data Pribadi).
4	<i>Cyberstalking</i> (Pengawasan Berulang).
5	<i>Deepfake Pornography</i> (Konten Palsu Menggunakan Ai).
6	<i>Hate Speech</i> Berbasis Gender

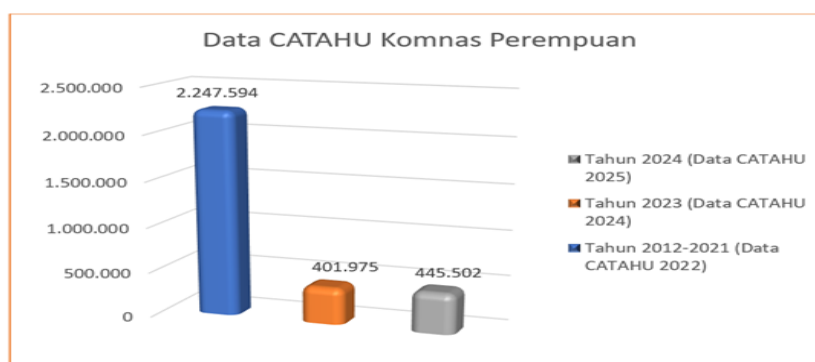
Dampak KBGO sangat merusak, terutama bagi generasi Z yang merupakan 1st digital natives, yang rentan mengalami stres, depresi, kecemasan, dan bahkan gangguan kesehatan mental jangka panjang akibat kekerasan ini (Ashivah Misbah et al., 2025). Selain itu, KBGO dapat menghambat partisipasi perempuan dalam mengembangkan identitas dan ekspresi dalam ruang digital, seperti dalam pemilu atau diskusi publik, sehingga hal ini semakin memperburuk ketidaksetaraan sosial. Bagi pelaku KBGO, perilaku ini mencerminkan kurangnya pemahaman etika digital, yang pada akhirnya merusak akhlak pribadi mereka sendiri, dan mengukur standar penilaian tentang perempuan dari pandangan mereka sendiri.

Upaya Anti KBGO di Indonesia

Indonesia telah aktif dalam kampanye anti KBGO melalui berbagai inisiatif. Salah satunya adalah kampanye #AwasKBGO yang digagas oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet), yang bertujuan mendidik masyarakat untuk mengenali, mencegah, dan menyikapi KBGO (Kusuma Ellen & Nenden Sekar Arum, 2019). Kampanye ini mencakup pembuatan konten edukasi, seperti poster dan video, yang disebarluaskan melalui media sosial untuk menjangkau generasi muda. Selain itu, setiap tahun diadakan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP), yang pada tahun 2025 mengusung tema “Kembalikan Ruang Aman: Inklusi Nyata bagi Perempuan Disabilitas”. Kampanye ini melibatkan pemerintah, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kem PPPA), serta organisasi seperti Komnas Perempuan, guna peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan korban, khususnya anak dan perempuan. Edukasi di desa-desa, juga dilakukan melalui pembuatan konten anti KBGO,

yang bertujuan untuk mengatasi tabu sosial seputar isu KBGO khusus pada disabilitas perempuan. Komnas Perempuan setiap tahun melakukan kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP) yang juga mencakup kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Kampanye ini diperingati setiap tahun mulai dari 25 November hingga 10 Desember. Kampanye ini bermula dari Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional (25 November) dan diakhiri pada Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia (10 Desember) (Mariana, 2018).

Sejarah Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan ini pertama kali dimulai sebagai kampanye internasional untuk mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Pada tahun 1991, *Women's Global Leadership Institute*, didukung oleh *Center for Women's Global Leadership*, yang memulai inisiatif ini. Kegiatan ini diadakan setiap tahun dari 25 November, Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, hingga 10 Desember, Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Terpilihnya rentang waktu tersebut yaitu dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja bersama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak, baik aktivis HAM Perempuan, pemerintah, maupun masyarakat secara umum.



Gambar 2. Sumber : Data Catatan Tahunan (Komnas Perempuan, 2024)

Kegiatan kampanye diadakan selama rentang 16 hari, Komnas Perempuan mengajak berbagai komponen masyarakat untuk membangun strategi pengorganisasian untuk menyepakati agenda bersama yakni untuk :

1. Menggerakkan solidaritas berdasarkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM yang serius.
2. Mendorong kegiatan bersama untuk menjamin perlindungan lebih baik bagi para *survivor* atau penyintas (korban yang sudah mampu melampaui pengalaman kekerasan)
3. Mmepersuasi semua orang untuk terlibat aktif sesuai dengan kapasitasnya dalam upaya menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Pemerintah juga mendorong pendekatan hukum, seperti melalui Undang-Undang ITE dan upaya perlindungan korban, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya. Kolaborasi dengan universitas, seperti Universitas Malikussaleh, guna melawan kekerasan digital berbasis gender secara online. Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi ini merupakan pengabdian guna memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, agar audiens sadar atas tantangan online yang terjadi kini. Isu Gender dan Anak selama ini kurang diperhitungkan, dalam berbagai proses kebijakan pembangunan, hal ini terjadi karena ketersediaan data terpilah yang kurang memadai (Asmulyadi, 2023).

Membangun Ruang Aman Digital, Membangun Generasi Berakhlak dan Sehat

Indonesia, negara yang memiliki potensi besar untuk menerapkan konsep Society 5.0. Sebuah konsep model pembangunan yang mengintegrasikan kebutuhan teknologi dan sosial. Konsep Society 5.0 dapat diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet 5G, yang bertujuan untuk menghubungkan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Namun, penerapan konsep Society 5.0 di Indonesia juga harus mempertimbangkan tantangan terkait kesenjangan sosial, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya keahlian teknologi di beberapa daerah. Karena hal ini dapat mempengaruhi kehidupan sebagian masyarakat yang tidak mampu menghadapi perubahan akibat perkembangan zaman dan pertumbuhan teknologi yang pesat (Yudi Ardian Rahman, 2017), (Hasibuan et al., 2022). OlehGerakan anti KBGO bukan hanya tentang melindungi korban, tetapi juga tentang membangun fondasi akhlak yang kuat bagi generasi seterusnya. Di era digital, di mana interaksi online mendominasi, pendidikan anti KBGO membantu menanamkan nilai-nilai seperti rasa hormat, empati, dan tanggung jawab. Dengan memahami bahaya KBGO, generasi muda belajar bahwa ruang digital bukan tempat untuk melecehkan, melainkan untuk berkolaborasi secara positif. Hubungan ini semakin relevan dalam visi Indonesia Emas 2045, yang mana masyarakat yang bebas dari KBGO dianggap esensial untuk mencapai kemajuan nasional tanpa adanya diskriminasi (Siregar et al., 2023), (Lukman et al., 2022), (Hasibuan, Sayuti, Siregar, et al., 2023), (Hasibuan, Daud, et al., 2023).

Dalam perspektif agama dan etika, seperti yang dibahas dalam konteks Al-Quran, etika digital menjadi pondasi untuk mengakhiri *cyber bullying*, sehingga dapat membentuk karakter yang berakhlak mulia. Seterusnya, anti KBGO mendorong generasi muda untuk menjadi agen perubahan. Misalnya, melalui kampanye di sekolah dan kampus, mereka diajarkan untuk melaporkan kasus, mendukung korban, dan menghindari perilaku berisiko. Hal ini tidak hanya mengurangi dampak psikologis seperti depresi, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih inklusif, di mana nilai-nilai keadilan

gender menjadi bagian dari akhlak sehari-hari. Di Indonesia, kasus KBGO semakin marak, dengan peningkatan signifikan dari 97 kasus pada 2018 menjadi 4.736 kasus pada tahun 2022, didominasi oleh penyebaran konten intim non-konsensual (Kusuma Ellen & Nenden Sekar Arum, 2019). Artikel ini membahas tentang upaya anti-KBGO, mulai dari pemahaman, pencegahan, hingga dukungan bagi korban, untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman.

Artikel ini ditulis untuk aksi solidaritas pada peringatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Salah satu aksi yang telah dicapai yaitu telah dipresentasikan dalam sosialisasi Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Universitas Malikussaleh. Untuk mencegah dan memerangi KBGO, masyarakat harus dididik tentang hak digital, privasi, dan pentingnya etika saat menggunakan internet. Selain itu, orang tua dan pendidik harus mengajarkan anak-anak mereka untuk menggunakan teknologi yang aman dan bijak. Tidak diperkenankan diam, jaim menjadi korban atau menyaksikan KBGO. Segera laporkan kepada pihak berwenang, termasuk layanan pengaduan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Implementasi masyarakat digital di era Society 5.0 di bidang pendidikan memiliki beberapa tantangan. Sehingga harus ada kehati-hatian yang dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak berfungsi untuk menggantikan, melainkan berfungsi guna meningkatkan interaksi antara siswa dan guru. Sehingga dengan mengedukasikan bentuk-bentuk kekerasan yang ada di ruang digital, dapat membuat generasi muda dan seterusnya memiliki kesadaran dalam berekspresi, berpendapat di ruang digital (Graciello & Wibawa, 2022), (Hasibuan et al., 2024).

Metode Pelaksanaan

Artikel ini dibuat, sebagai bentuk solidaritas dalam mengkampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang seterusnya diperingati pada setiap tanggal 25 November hingga 10 Desember. Program Pencegahan KBGO ini merupakan bentuk kegiatan penyuluhan yang bertujuan memberikan edukasi untuk upaya meningkatkan pemahaman dalam membentuk kesadaran hukum khususnya bagi akhlak generasi, sebagai langkah preventif menangani isu KBGO, dan kegiatan ini diselenggarakan pada 21 November 2025. Artikel ini juga didasarkan dari hasil implementasi dalam pengabdian yang telah dilakukan dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh, yang telah dipresentasikan dalam kegiatan Dharma Wanita Perguruan Tinggi Universitas Malikussaleh yang bertajuk *positive vibes Membangun Ruang Aman Digital Bagi Anak dan Perempuan Di Era Society 5.0*. Pengabdian ini mengungkap dengan menggunakan Teknik PAS (*Problem, Agitate, Solution*) *Copywriting*, yang mana *Problem-Agitate-Solution* (PAS) *Copywriting* adalah teknik penulisan yang digunakan untuk menarik perhatian audiens dengan mengidentifikasi masalah, memperbesar atau menggugah emosi terkait masalah tersebut, dan kemudian menawarkan solusi yang relevan bagi pemecahan suatu masalah (Memon, 2022), (HASIBUAN, 2017), (PUTRI ET AL., 2022). Peserta umumnya tidak familiar dengan sebagian besar istilah-istilah kekerasan berbasis gender online. Hal ini menunjukkan pengenalan KBGO masih meniti jalan panjang sebelum kemudian menjadi pengetahuan umum yang diinternalisasi oleh masyarakat.

Solusi yang Ditawarkan

Bentuk kekerasan berbasis gender online tersebut penting dibedakan dari kekerasan terhadap Perempuan secara fisik, agar solusi yang diberikan lebih tepat dan efektif. Jika KBGO yang terjadi, solusinya bukan semata penegakan hukum, tetapi juga perlu intervensi yang mampu mengubah cara pandang pelaku terkait relasi gender dan seksual dengan korban. Oleh karenanya, tanpa adanya intervensi secara kolaborasi, biasanya setelah menjalani hukuman, pelaku akan tetap memiliki cara pandang tentang bias gender dan seksual.

Strategi Anti-KBGO: Pencegahan dan Penanganan

Untuk melawan KBGO, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, regulasi, dan dukungan korban. Berikut beberapa langkah konkret:

1. Edukasi dan kesadaran Masyarakat mulai dibangun dengan memahami konsep *consent* (persetujuan) dan relasi gender yang setara. Kampanye anti-KBGO harus menekankan bahwa kekerasan online sama seriusnya dengan kekerasan fisik. Bijak dalam mengunggah konten di media sosial menjadi kunci pencegahan, seperti menghindari berbagi informasi pribadi yang bisa disalahgunakan.



Gambar 3. Bentuk-bentuk KBGO

2. Dukungan bagi para korban dengan berempati sebagai pendengar dan percaya pada cerita korban tanpa menyalahkan mereka. Jika menjadi korban, segera laporkan ke platform terkait atau lembaga seperti Komnas

Perempuan, SAFENet, atau polisi. Konsultasi dengan psikolog juga dapat membantu mengatasi trauma, seperti depresi akibat KBGO. Di Indonesia, Komnas Perempuan telah meluncurkan laporan pengembangan pengetahuan KBGO untuk memperkuat ruang aman digital, khususnya di wilayah kepulauan.

3. Peran Platform Digital dan Regulasi: Perusahaan teknologi harus meningkatkan keamanan platform dengan sistem yang peka terhadap isu gender, seperti algoritma deteksi otomatis untuk konten berbahaya. Di tingkat hukum, Indonesia perlu memperkuat kerangka regulasi KBGO, karena undang-undang saat ini masih jauh dari berbasis gender. Dorong tradisi *digital citizenship*, di mana pengguna bertanggung jawab atas konten yang mereka bagikan, dan jangan sebarluaskan materi yang merugikan.
4. Kolaborasi Multi-Pihak, Pemerintah, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), harus tegas dalam kampanye anti-KBGO. Kerja sama dengan organisasi seperti LBH APIK dan universitas, dengan mengadakan seminar dengan pakarnya, serta dapat membangun ekosistem supportif bagi korban. Sehingga ada transformasi budaya anti-kekerasan, diperlukan agar korban tidak lagi dibungkam.

Relawan sebagai pejuang KBGO Bersama-sama dapat menciptakan ruang digital yang aman dan setara bagi semua gender. Dengan edukasi, dukungan, dan regulasi yang kuat, kita dapat mengurangi kasus KBGO dan memberdayakan korban untuk bangkit menghadapi realita. Karena dalam setiap tindakan kecil seperti tidak membagikan konten intim tanpa persetujuan bisa mencegah aksi kekerasan lebih lanjut. Sehingga perlunya mewujudkan Indonesia bebas KBGO, di mana perempuan dan semua individu dapat berpartisipasi tanpa rasa takut.

Anti KBGO merupakan gerakan holistik yang melampaui pencegahan kekerasan, yang merupakan investasi dalam pembangunan akhlak generasi muda. Dengan edukasi, kampanye, dan dukungan hukum, Indonesia dapat menciptakan ruang digital yang aman dan bermoral. Generasi muda, sebagai penerus bangsa, harus didorong untuk aktif terlibat dalam kampanye anti kekerasan ini, sebagai dasar membentuk visi masyarakat yang adil dan berakhlak tinggi dapat terwujud menuju ruang digital yang inklusif dan aman bagi anak dan Perempuan.

Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian diatas, hal ini dapat menjadi tindak lanjut dari bagaimana cara media digital membangun ruang aman digital bagi anak dan Perempuan di era Society 5.0? dalam membangun identitas Perempuan, solidaritas Perempuan dan membawa dampak positif bagi Perempuan? Media harus kembali pada fungsinya, yaitu sebagai alat. Sehingga media digital dapat menjadi ruang aman bagi Perempuan dalam berekspresi bebas, melawan diskriminasi dan mengembangkan diri tanpa ancaman fisik dan psikologis dari luar. Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik, yang manadapat melibatkan pengguna, komunitas dan platform.

Terdapat beberapa Langkah dalam menjawab pertanyaan diatas, diantaranya yaitu :

Pertama, membangun identitas Perempuan dalam mendefinisikan diri sendiri, bukan sebagai objek stereotif (sebagai korban atau radikal), namun mengidentifikasikan pribadi sebagai individu yang kreatif, CADAS (Cerdas Berintegritas), profesional, dan berdaya. Sehingga hal ini dapat membantu mengatasi representasi negative yang massif di media mainstream dalam membangun narasi yang otentik tentang Perempuan (yang biasanya menjadi acuan munculnya media nonmainstream). Misal, dengan menciptakan konten sendiri, namun yang menginspirasi dan memanfaatkan platform seperti Instagram, Youtube guna berbagi ide-ide dan dakwah yang dikemas dengan alunan music yang lembut, sehingga dapat mencerminkan identitas seorang Muslimah yang cerdas dan modern. Contoh el Alice, Muslimah (generasi Z) yang berdakwah melalui lagunya yang kekinian , yaitu Ental Amiin. Seterusnya Perempuan dapat mengembangkan diri melalui renegotiasi ruang digital sesuai identitas profesionalismenya, dari mengatur privasi platformnya hingga membangun identitas Perempuan yang inklusif dan kreatif.

Kedua, Membangun solidaritas melalui ruang digital dapat menciptakan ikatan antar Perempuan secara transnasional, yang mana dari hal tersebut, Perempuan dapat beradaptasi dengan berbagai bahas, berbagi pengalaman, mendapat dukungan emosional dan mengembangkan polapikir ditengah isolasi akibat pelecehan, atau diskriminasi, yang dapat membangun dan memperkuat rasa solidaritas, tanpa ada judgement. Dan mengembangkan solidaritasnya dengan menggunakan #hashtag guna terhubung dengan Perempuan muslim dari seluruh negara (solidaritas transnasional). Misal, dengan membentuk adanya komunitas Muslimah di Podcast yang saling menjaga iman dan berempati, contoh Digital sisterhood, #muslim woman, #hijab solidaritas, #orangeyourlife. Ketiga, dengan membangun perubahan untuk membawa dampak positif social. Hal ini berarti media digital dapat menjadi advokasi guna melawan ketidakadilan, membuat narasi dari kelompok dominan dan dapat mendorong perubahan seperti lahirnya kebijakan HAKTP. Sehingga media digital dapat menjadi alat pemberdayaan Perempuan yang kuat dalam memperkuat akhlak generasinya.

Kesimpulan

Di tengah kemajuan teknologi Society 5.0 yang menempatkan manusia sebagai pusat untuk menyelesaikan masalah sosial melalui inovasi seperti AI, IoT, dan big data, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi ancaman serius yang dapat merusak kesehatan mental, memperburuk ketidaksetaraan gender, dan menghambat partisipasi perempuan serta anak di ruang digital. Di Indonesia, kasus KBGO yang melonjak drastis menuntut upaya holistik melalui edukasi kesadaran masyarakat, kampanye seperti #AwasKBGO dan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, regulasi hukum yang lebih kuat, dukungan korban, serta kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, organisasi sipil, platform digital, dan universitas. Gerakan anti-KBGO bukan hanya pencegahan kekerasan, melainkan investasi dalam membangun akhlak generasi muda yang beretika, inklusif, dan bertanggung jawab, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan ruang digital yang aman, setara, dan bebas diskriminasi bagi semua, khususnya perempuan dan anak. Tindakan kolektif, mulai dari edukasi pemahaman hingga pelaporan kasus, menjadi kunci transformasi budaya untuk mengakhiri KBGO. Maka apapun aktifitas dalam bermedia ini, Perempuan tidak hanya mengkonsumsi media digital, namun justru

dengan berpikir kritis dan kesadaran akan empati terhadap Perempuan menjadi sangat penting, dengan strategi yang tepat, media digital dapat menjadi alat pemberdayaan Perempuan yang kuat.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Dharma Wanita Persatuan Universitas Malikussaleh, dan seluruh anggota tim pengabdian sehingga program ini terlaksana dengan baik dalam rangka mensosialisasikan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 Nopember – 10 Desember 2025).

Referensi

- Ashivah Misbah, N., Lintangdesi Afriani, A., & Nidatya, N. (2025). Online Gender-Based Violence Education for Teenagers at SMA 66 Jakarta Edukasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada Remaja di SMA 66 Jakarta. *Jurnal Wiyata Madani*, 2(1), 10–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.33822/jwm.v2i1.10583>
- Asmulyadi. (2023). *Pendampingan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Kota Lhokseumawe*. DPPPA.
- Clerck, J.-P. De. (2017). *From Industry 4.0 to Society 5.0: the big societal transformation plan of Japan*. I-Scoop.
- Graciello, M., & Wibawa, A. (2022). Indonesia Dalam Pertumbuhan Digital Society 5.0. *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik*, 2(2), 50–55. <https://doi.org/10.17977/um068v2i22022p50-55>
- Hardi, S., Tambunan, J. D. A., Hasibuan, A., & others. (2020). Influence of Static VAR Compensator Application for Improving Power Quality in Distribution Lines Supplied Industry. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1003(1), 12136.
- Hasibuan, A. (2017). *Buku Etika Profesi-Profesionalisme Kerja* (pp. 1–259).
- Hasibuan, A., Asran, A., Sembiring, R. R., Isa, M., Yusoff, M. I., & Rahim, S. R. A. (2021). Design Of Investment Detection In Fish Cultivation Uno Arduino Based. *Andalasian International Journal of Applied Science, Engineering and Technology*, 1(1), 10–20.
- Hasibuan, A., Daud, M., Andria, R., Nnrtha, I. M. A., Sayuti, M., & Lukman, F. S. (2023). Design of Ammonia Gas Detection and Control Devices in Chicken Farms Based on Arduino Uno. *Motivection: Journal of Mechanical, Electrical and Industrial Engineering*, 5(3), 485–500.
- Hasibuan, A., Sayuti, M., Fithra, H., Siregar, W. V., Mariyudi, M., Puspasari, C., Hasibuan, M. R. F., Fadhilati, N. I., & Al Farizi, R. (2023). Sosialisasi Penanganan Dini Kebakaran Pada Sekolah Di Lhokseumawe-Aceh Utara. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 3(2), 95–99.
- Hasibuan, A., Sayuti, M., Siregar, W. V., Hidayatullah, F., Kurniawan, R., & Fahroji, R. (2023). Optimizing Renewable Energy Potential for Tourism in Banyak Area, Aceh Singkil, Indonesia, Using Analytical Hierarchy Process as Alternative Energy. *2023 2nd International Conference on Computer System, Information Technology, and Electrical Engineering (COSITE)*, 19–24.
- Hasibuan, A., Siregar, W. V., & Riskina, S. (2022). *Sekelumit Keberagaman Lhokseumawe dan Aceh Utara . Pelataran Sastra Kaliwungu*.
- Hasibuan, A., Siregar, W. V., Sukarwoto, S., & Cahyadi, C. I. (2024). Sosialisasi Pengembangan Akademik Berbasis Kemitraan Industri dan Riset di Politeknik Penerbangan Medan. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 4(1), 17–21.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catahu 2024 : Menata Data, Menajamkan Arah*.
- Kusuma Ellen, & Nenden Sekar Arum. (2019). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. In *Safenet* (p. 20). Safenet (Southeast Asia Freedom Of Expression Network).
- Lukman, F. S., Mubarak, H., & Hasibuan, A. (2022). Power Bank kWh Meter Automatic Meter Reading. *RELE (Rekayasa Elektrikal Dan Energi): Jurnal Teknik Elektro*, 4(2), 129–133.
- Mariana, A. (2018). Ayo Menjadi Bagian dari Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 Nov-10 Desember). *Komnas Perempuan*, 1.
- Memon, M. (2022). *Problem Agitate Solution (PAS)*. Storyprompt.Com.
- Office, C. (2021). *Society 5.0*. Wwww8.Cao.Go.Jp.
- Putri, R., Asran, A., Hasibuan, A., Akrtika, K., Faisal, F., & Saifannur, S. (2022). Sosialisasi Peningkatan Kualitas Produktivitas Panen Udang Melalui Pemberian Pakan Udang Secara Otomatis di Meunasah Aron. *J. SOLMA*, 11(3), 564–571.
- Siregar, W. V., Hasibuan, A., Sayuti, M., & Puspasari, C. (2023). Edukasi pemanfaatan digital marketing bagi pelaku industri. *Mejuajua: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 37–41.